

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugraha, Wahyu, Aditya, *“Metodologi Penelitian”*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).
- Rahayu, Sri, Ani, *“Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Chomzah, Achmad, Ali, *“Hukum Pertanahan”*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Parlindungan, AP, *“Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, Mamdar Maju, Bandung, 1999, hlm 37.
- Hutagalung, Sukanti, Arie, *“Pengaturan Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak dan Tanah Negara Bekas Kawasan di Tinjau Dari Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan”*. Makalah disampaikan pada lokarya pengelolaan tanah negara bebas hak dan tanah negara bekas kawasan, diselenggarakan oleh BPN di Golden Boutique Hotek pada tanggal 26 November 2010.
- Harsono, Boedi, *“Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaan”*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Harsono, Boedi, *“Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Harsono, Boedi, *“Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Perkembangan Pemikiran dan Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007”*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
- Solihin, Dadang, *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Basri, Faisal, *“Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia”*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- Slaatts, Herman, *“Masalah Tanah di Indonesia Dari Masa ke Masa”*, Lembaga Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Syafie, Kencana, Ibnu, *“Sistem Pemerintahan Indonesia”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Syafie, Kencana, Ibnu, *“Pengantar Ilmu Pemerintahan”*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.

- Kamaluddin, Nas, Jayadi, *“Otonomi daerah dan Kepala Daerah”*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002.
- Hartanto, Andy, J, *“Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya”*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).
- Sembiring, Julius, *“Tanah Negara Edisi Revisi”*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Doyle, P, Johnson, *“Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1. Terj. Robert M.Z.”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- Hidjaz, Kamal, *“Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”*, Pustaka Refleksi. Makassar, 2010.
- Widajaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bariun, Ode, La, *“Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan”*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.
- Az, Santoso, Lukman, *“Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Sumardjono, S.W., Maria, *“Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat”*, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Huda, Ni'matul, *“Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009.
- Nurmayani S.H., M.H. *“Hukum Administrasi Daerah”*. Universitas Lampung Bandarlampung, 2009.
- HR, Ridwan, *“Hukum Administrasi Negara”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Samsu, *“Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods, serta Research & Development)”*, (Jambi: Pustaka, 2017).
- Sarundajang, *“Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Retnami, Setya, *“Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, 2001.

- Marbun, SF, *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia”*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sunarno, Siswanto, *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, Sinar Garfika, Jakarta: 2012.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D”*, (Bandung: CV. Alfabet, 2017).
- Muslimin, Chaniago, Suharizal, *“Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945”*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Soegiarto, *“Bhumi Bhakti”*, Majalah Terbitan Badan Pertanahan Nasional, No. 7 Tahun 1994.
- Hadjon, M, Philipus, *“Penataan Hukum Administrasi”*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Manis, Yanis, *“Impementasi Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat”*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

Jurnal

- Damanik, Amsari, *“Problematika Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Sebagai Dasar Penguasaan Tanah di Samarinda”*, Jurnal hukum lex Generalis, Vol.2 No.9, 2021.
- Sholahuddin Al-Fatih, Diah Nadia Putri, Adinda Putri Jade, *“Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan”*, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, (2020).
- Budiman, Arief, *“Pensertipikatan Tanah Negara Oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik”*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, (2020).
- S. Anastasia, *“Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik Pertanahan Indonesia”*, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, (2022).
- Rafi Ridha, Firly Amalia, Nur Auliya Rahmatika, *“Eksistensi Izin Membuka Tanah Negara Dalam Penataan Ruang Kota Balikpapan”* *Padjadjaran Law Review*, (2024).
- Nurul, Siti, *“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate)”*, *Jurnal Government of Archipelago*, VII.September (2024).

- Nur Auliya Rahmatika, Indah Dwi Qurbani, dan Dewi Cahyandari, *"Pengaturan Dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan"*, Warkat, (2023).
- Indriana Andani dan Muhammad Jamal Amin, *"Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020)"*, *Pemerintahan Integratif*, 8.4 (2022).
- Esyca Sonti Nainggolan, Haryono Susuilo Utomo, and Santi Rande, *"ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN"*, *Journal Administrasi Publik*, 10.1 (2022).
- Wirawan, Vani, *"REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA"*, *Jurnal Hukum Progresif*, (2021).
- Dewi Cahyandari, Indah Dwi Qurbani, Nur Auliya Rahmatika, *"Pengaturan Dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan"*, Warkat, (2023).
- Muhammad Jamal Amin, Indriana Andani, *"Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020)"*, *Pemerintahan Integratif*, (2022).
- Nasir, Mohamad, *"The Implication of Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation towards Regulation on the Permit to Open Land State in East Kalimantan"*, *Jurnal Borneo Administrator*, (2021).
- Andani dan Amin, *"Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020)"*.
- Hizkia Hutabarat, Erita Sitohang, dan Tulus Siambaton, *"Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah"*, *Jurnal Hukum PATIK*, 10.1 (2021).

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 73 Tahun 2023 Atas Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara

Internet

Pengertian Provinsi dan Kabupaten/Kota diakses melalui www.informasi ahli.com pada 24 November 2024

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>